



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOTARDUGA HUTABARAT
2. Jabatan : INSPEKTUR INVESTIGASI
3. NHK : 487003

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.175.000.000

1. Tanah Seluas 75 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 506 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 253 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/166 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/82 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 832 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 50.000.000
8. Tanah Seluas 978 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 999 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 25.000.000
10. Tanah Seluas 500 m2 di TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 117.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KATANA/JIP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
90.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	
3.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	375.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	253.273.238
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.920.273.238
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.920.273.238

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.